

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah

The Role of Village-Owned Enterprises in Improving the Economy of Village Communities in Budong-Budong District, Central Mamuju Regency

Mirnayanti¹, Abdul Halim², Rusli³

mirnayantiatph@gmail.com

alingmandar01@gmail.com

ruslimamuju42@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Mamuju**

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Budong-Budong, studi kasus Di Desa Babana, Desa Kire, Desa Lumu, Desa Salumanurung, Desa Pontanakayyang, Desa Salugatta, Desa Tinali, dan Desa Barakkang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melibatkan 7 informan yaitu 9 informan kunci, 6 informan utama, dan 12 informan pendukung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa Pada dasarnya sangat penting dalam peningkatan perekonomian sebagaimana fungsi dan tujuan Badan Usaha Milik Desa yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan asli desa. Namun dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Budong-Budong terdapat kesenjangan sumber daya manusia dan pengelolaannya. Di tiap-tiap desa masih banyak pengurus Badan usaha milik desa yang belum paham fungsi dan tugasnya dan masyarakat yang mendapat bantuan modal tidak bertanggungjawab seperti modal yang dipinjam tidak dikembalikan.

Kata Kunci : Peran BUMDes, Perekonomian Masyarakat.

ABSTRACT

This research relates to the role of Village-Owned Enterprises in improving the economy of village communities in Budong-Budong District, case studies in Babana Village, Kire Village, Lumu Village, Salumanurung Village, Pontanakayyang Village, Salugatta Village, Tinali Village, and Barakkang Village. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques namely observation, interviews and documentation. This research involved 7 informants, namely 9 key informants, 6 main informants, and 12 supporting informants. The aim of this research is to determine the role of Village-Owned Enterprises in improving the community economy and to find out what are the inhibiting and supporting factors for Village-Owned Enterprises in improving the community economy.

The conclusion from this research is that Village-Owned Enterprises are basically very important in improving the economy as the function and purpose of Village-Owned Enterprises is to improve the community's economy and increase the village's original income. However, in the management of Village-Owned Enterprises in Budong-Budong District, there are gaps in human resources and management. In every village there are still many administrators of village-owned enterprises who do not

understand their functions and duties and people who receive capital assistance are irresponsible, such as when the capital they borrow is not returned.

Keywords: *Role of BUMDes, Community Economy.*

PENDAHULUAN

Meningkatkan basis ekonomi di suatu pedesaan telah lama dilakukan oleh pemerintah desa dengan berbagai macam program. Akan tetapi belum begitu memuaskan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu pendekatan yang di mana mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mendorong gerak ekonomi desa melalui berwirausaha yang telah disediakan oleh badan usaha milik desa yang akan dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat (Dewi, 2014:23).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia menyalurkan dana desa yang kemudian bisa dimanfaatkan pemerintah desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu suatu Lembaga yang bertujuan untuk mengelola keuangan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri. Pemberian modal oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 dapat mendukung program pembangunan desa serta mampu mengatasi masalahnya (Agustina, 2019:34). Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Langkah nyata untuk mendorong serta membangun masyarakat atau mensejahterakan rakyat dan mengasah potensi sumber daya sesuai dengan kebutuhannya serta memperluas jaringan yaitu dengan menjalin Kerjasama antar desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Pembentukan badan usaha milik desa merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan

perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa (Anggunanto dkk., 2016:56). Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa yaitu dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa. Fungsi Badan Usaha Milik Desa terdiri dari penyambutan kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bertumpu pada potensi asli desa. Ini dapat membuat bisnis lebih produktif dan efektif (Pariyanti & Susiani, 2020:2). Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat berfungsi sebagai penopang kemandirian Desa, sekaligus sebagai lembaga yang menyambut baik kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lembaga usaha desa atau Badan Usaha Milik Desa dapat mengelola potensi desa yang ada dengan membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan perekonomian desa. Dalam islam manusia juga dituntut untuk berusaha melakukan pembangunan agar terciptanya perubahan perekonomian yang lebih baik, sebagaimana tertuang dalam ayat Al-Qur'an (Al-Anfal: 53) berikut.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا بَعْضَهَا أَعْمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat

yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Munculnya Badan usaha milik desa yang dianggap sebagai salah satu alternatif ataupun solusi, bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan guna menciptakan kesejahteraan desa, tentu menarik jika kita kaji lebih dalam, apakah Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk dan berada di daerah-daerah ataupun pelosok mampu menjawab harapan semua pihak.

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Sulawesi Barat yang berpotensi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa mengingat wilayahnya terdiri dari banyak sekali daerah terpencil yang membutuhkan inovasi dan pendampingan, Salah satunya yaitu Kecamatan Budong-Budong. Kecamatan Budong-Budong ini terdiri dari sebelas desa yaitu Desa Babana, Barakkang, Bojo, Kire, Lembah Hada, Lumu, Pasapa, Pontanakayang, Salugatta, Salumanurung, dan Tinali. Dari sebelas desa yang ada di kecamatan budong-budong hanya beberapa desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1

Daftar Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Budong-Budong.

No	Nama Desa	BUMDes	
		Ada	Tidak Ada
1	Babana	√	
2	Kire	√	
3	Lumu		√
4	Salumanurung		√
5	Salugatta	√	
6	Tinali	√	
7	Barakkang	√	
8	Bojo		√
9	Lembah Hada		√
10	Pontanakayang	√	
11	Pasapa		√

Berdasarkan tabel di atas ada enam desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah berharap dengan adanya Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang mana berapa persen keuntungan yang didapatkan oleh Badan Usaha Milik Desa akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa/PADes. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik desa

METODE

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Budong-Budong. Untuk mengetahui Faktor penghambat dan pendukung Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Budong-Budong. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Budong-Budong.

Jenis penelitian ini yakni Kualitatif, Lokasi penelitian merupakan lokasi yang digunakan

untuk memperoleh informasi, permasalahan, dan solusi selama berlangsungnya penelitian. Dalam penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam penelitian kualitatif ini jenis data yang digunakan yaitu data yang berbentuk kata atau informasi, skema, dan gambar bukan berupa angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

Data primer diperlukan dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema penelitian yaitu yang berhubungan dengan peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sumber data sekunder ini akan diperoleh di bagian Tata Usaha Desa dan dari data publik yang disediakan oleh BPS maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan data. Sumber data sekunder ini akan diperoleh di bagian Tata Usaha Desa dan dari data publik yang disediakan oleh BPS maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan data. Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun jumlah informan sebanyak 27 orang. Pemerintah Kecamatan 1 orang, Pemerintah sebanyak 8 orang, Pengurus Badan Usaha Milik Desa sebanyak 6 orang, Masyarakat Desa sebanyak 12 orang. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknis analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan data tersebut, maka proses analisa penelitian data pada penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yakni Reduksi Data, Data display atau penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi

PEMBAHASAN

Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Budong-Budong

1. Peran BUMDes Desa Babana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

BUMDes di Desa Babana mulai dibentuk pada tahun 2017 dimana tujuan pembentukan BUMDes tersebut yaitu untuk menambah pendapatan asli desa babana. Adapun usaha BUMDes Babana pada tahun 2019 yaitu jual beli campuran dan pangkalan tabung gas namun usaha tersebut terhenti karena kepengurusan BUMDes yang tidak berlanjut. Berikut adalah pernyataan AR terkait kondisi BUMDes Babana

“BUMDes Babana sebelumnya memiliki usaha Jual beli campuran dan usaha pangkalan tabung namun belum dapat memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena kepengurusan yang tidak efektif sehingga BUMDes Babana berhenti beroperasi”. (AR, Senin, 12/06/23).

Kondisi inilah yang membuat BUMDes di Desa Babana vakum sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat yang tak kunjung berkembang.

2. Peran Umum BUMDes Desa Kire dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

BUMDes di Desa Kire mulai terbentuk pada tahun 2016 namun saat itu belum beroperasi. Di tahun 2022 BUMDes tersebut baru beroperasi. Adapun jenis usahanya yaitu Sewa Tenda Terowongan dan Sewa Kursi. Namun beberapa bulan terakhir usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya kerusakan dan sampai saat ini tenda terowongan tersebut masih dalam perbaikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan SY, SY menyatakan bahwa:

“BUMDes didirikan pada tahun 2016 untuk Menambah pendapatan asli desa dengan usaha sewa kursi dan tenda terowongan. Tahun ini kami menganggarkan penyertaan modal kepada BUMDes sebesar Rp. 60 juta untuk menambah usaha sebagai agen BRILink. Namun belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat

dikarenakan salah satu unit usahanya sedang dalam perbaikan yaitu usaha sewa tenda terowongan. Selain itu yang menghambat perkembangan BUMDes yaitu terjadinya pergantian pengurus sehingga pengurus saat ini belum memahami tugas dan fungsinya". (SY, Senin, 12/06/23).

Menurut SG Pergantian pengurus adalah salah satu faktor penghambat BUMDes tidak berkembang. Hal ini juga sesuai dengan Pernyataan SB selaku Ketua BUMDes yang menyatakan

"Saya tidak tahu apa itu BUMDes karena saya baru dilantik sekitar 3 bulan yang lalu dan belum ada edukasi dari pemerintah terkait BUMDes". (SB, Senin, 12/06/23).

Adapun pernyataan dari NAA mengatakan bahwa :

"Yang saya ketahui BUMDes Kire memiliki usaha penyewaan tenda terowongan dan kursi namun sarana prasarana kurang memadai apalagi tenda terowongan sudah beberapa bulan mengalami kerusakan, sementara pengelolaannya mengalami banyak hambatan salah satunya yaitu struktur organisasi tidak tersusun dengan baik". (NAA, Senin, 12/06/23).

Hasil penuturan dari seluruh informan tentang BUMDes Kire yaitu BUMDes Kire memiliki usaha jasa sewa kursi dan tenda terowongan namun belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat karena ada beberapa hambatan diantaranya tenda terowongan yang sudah beberapa bulan yang lalu mengalami kerusakan yang menjadikan usaha tersebut tidak berjalan juga adanya masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pada BUMDes Kire yang dimana pengurus belum menguasai tugas dan fungsinya dikarenakan adanya pergantian pengurus.

3. Peran BUMDes Desa Lumu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

BUMDes Desa Lumu berdiri pada tahun 2017. Usaha BUMDes tersebut berupa simpan pinjam, usaha sembako, depot air bersih dan perbengkelan. Adapun tujuan usaha-usaha tersebut meringankan masyarakat mendirikan usaha dan mendapatkan air bersih. Berikut adalah pernyataan yang diungkapkan oleh RM

"BUMDes Lumu berdiri pada tahun 2017. Pada awal-awal tahun dibentuknya BUMDes itu cukup berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat namun sayangnya saat ini semua unit usaha tersebut berhenti". (RM, Rabu, 14/06/23).

Berhentinya semua unit usaha BUMDes juga diakui oleh RA selaku Ketua BUMDes Lumu. RA menyatakan bahwa:

"BUMDes Lumu memiliki unit Usaha Simpan pinjam, Perbengkelan, jual sembako, dan depot air bersih, namun semua usaha tersebut sudah berhenti". (RA, Rabu, 14/06/23).

Kesimpulan dari jawaban semua informan di atas adalah BUMDes Lumu memiliki Unit usaha simpan pinjam, perbengkelan, jual sembako, dan depot air bersih namun tidak berperan dalam meningkatkan perekonomian karena semua unit usaha itu sudah tidak berjalan.

4. Peran BUMDes Desa Salumanurung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

Desa Salumanurung memiliki BUMDes dan sempat berjalan dengan unit usaha simpan pinjam namun tidak beroperasi di tahun 2021. Hal ini diungkap diungkap oleh AS yang menyatakan:

"Saya baru menjabat tahun lalu (2022) jadi saya tidak tahu kapan BUMDes mulai dibentuk, yang saya ketahui BUMDes sempat memiliki usaha simpan pinjam namun saat ini sudah tidak berjalan karena berakhirnya SK kepengurusan dan kepala desa baru tidak paham tentang BUMDes. Pemerintah Desa ingin membentuk BUMDes tapi terhalang

karena pengurus BUMDes sebelumnya belum menyetor laporan pertanggungjawaban BUMDes”. (AS, Rabu, 14/06/23)

Kesimpulan dari informan di atas adalah BUMDes Salumanurung tidak berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dikarenakan berakhirnya SK Kepengurusan BUMDes.

5. Peran BUMDes Desa Pontanakayyang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

BUMDes di Desa Pontanakayyang berdiri pada tahun 2015 namun saat itu belum beroperasi dan mulai beroperasi pada tahun 2022. Hal ini sesuai dengan pernyataan TT yang menyatakan bahwa :

“BUMDes berdiri pada tahun 2015 dengan tujuan meningkatkan ekonomi, sejauh ini BUMDes baru menyetor ke PADes pada tahun ini (2023) karena pada tahun sebelumnya BUMDes belum aktif”. (TT, Kamis, 06/07/23).

Pernyataan TT yang menyatakan bahwa BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa juga dibenarkan oleh SJ selaku Ketua BUMDes Pontanakayyang.

“BUMDes berpengaruh terhadap Pendapatan asli desa namun belum signifikan karena keberadaan tenda terowongan baru 1 bulan sedangkan usaha produksi ikan air tawar belum pernah dipanen ikannya”. (SJ, Kamis, 06/07/23).

Dari pernyataan SJ di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pontanakayyang memiliki usaha tenda terowongan dan produksi ikan tawar namun tidak semua masyarakat mengetahui unit-unit usaha tersebut. Seperti pernyataan salah satu informan masyarakat, HM menyatakan :

“Yang saya tahu usaha BUMDes itu cuma peternakan ikan tawar namun mengalami kegagalan dikarenakan pengurus yang tidak tahu Teknik budidaya ikan tawar”. (HM, Kamis, 06/07/23).

Kesimpulan dari semua informan di atas adalah BUMDes Pontanakayyang berpengaruh terhadap pendapatan asli desa dengan usaha produksi ikan tawar dan sewa tenda terowongan, namun belum signifikan sebab produksi ikan tawar mengalami kegagalan sedangkan tenda terowongan baru berjalan sebulan yang lalu.

6. Peran BUMDes Desa Salugatta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

BUMDes desa salugatta berdiri di tahun 2017 dengan tujuan menambah pendapatan desa. Hal ini diungkap AD yang menyatakan :

“BUMDes Salugatta berdiri pada tahun 2017 dengan tujuan menambah pendapatan desa. Tujuan itu tercapai dengan BUMDes selalu menyetor tiap tahun untuk Pendapatan Asli Desa, selain itu BUMDes juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat”. (AD, Selasa, 20/06/23).

IS juga menyatakan hal yang serupa, bahwa:

“BUMDes memiliki usaha sewa kursi dan terowongan, sewa kamera, gedung olahraga dan Penyediaan tempat UMKM. Tiap tahun BUMDes menyumbang 5-10% keuntungan untuk pendapatan asli desa. Selain itu, BUMDes berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena aktif mengadakan event-event olahraga sehingga roda perekonomian di desa semakin berputar positif”

Kesimpulan dari semua informan di atas adalah BUMDes Salugatta cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan desa dengan menyumbang 5-10% dari keuntungan untuk pendapatan asli desa tiap tahunnya, juga BUMDes berperan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan seringnya mengadakan kegiatan terutama event olahraga yang sekaligus menjadi ladang meningkatkan UMKM masyarakat setempat.

7. Peran BUMDes Desa Tinali dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

BUMDes di Desa Tinali berdiri pada tahun 2016. Tujuan didirikan BUMDes tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli Desa dan ekonomi warga. BUMDes berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa sebagaimana pernyataan dari JM yang menyatakan bahwa :

“BUMDes berdiri pada tahun 2016 dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes berperan dalam meningkatkan perekonomian seperti tahun ini (2023) BUMDes menyettor Rp. 7 juta” (JM, 21/06/23).

MR juga menyatakan hal yang sama bahwa :

“BUMDes memiliki usaha simpan pinjam dan penyediaan pupuk dengan keuntungan usaha itu kami menyettor Rp. 4 juta pada tahun 2019, Rp. 5 juta pada tahun 2020, Rp. 4 juta pada tahun 2022, dan tahun ini (2023) kami menyettor Rp. 7 juta, Adapun pengaruh terhadap perekonomian masyarakat itu berpengaruh namun belum maksimal”. (MR, 21/06/23).

Dengan adanya usaha simpan pinjam sangat membantu masyarakat setempat mengatasi masalah peminjaman seperti pernyataan dari SB yang menyatakan bahwa:

“Sebelum BUMDes ada kami sangat kesulitan mencari pinjaman, tapi setelahnya ada BUMDes di desa maka sedikit mengurangi permasalahan pinjaman yang kami alami”. (SB, Rabu, 21/06/23).

Dari seluruh pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa, selain itu BUMDes Tinali juga meningkatkan perekonomian masyarakat namun belum maksimal.

8. Peran BUMDes Desa Barakkang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

BUMDes Barakkang berdiri pada tahun 2016, saat itu perekonomian masyarakat yang masih minim dan sulitnya mendapatkan pupuk sehingga BUMDes mendirikan unit usaha penyediaan pupuk, jasa sewa tenda terowongan dan kursi. Hal ini sesuai dengan pernyataan SA, bahwa:

“Bumdes berdiri pada tahun 2016 karena melihat perekonomian masyarakat setempat yang masih minim, untuk pemenuhan kebutuhan hidup Adapun tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengolahan potensi desa. BUMDes sudah memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat seperti unit usaha penyediaan pupuk karena pada saat itu petani mengalami kesulitan, untuk mendapatkan pupuk mereka harus menempuh jarak yang jauh”. (SA, Selasa, 27/06/23).

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan NW yang menyatakan bahwa:

“BUMDes sangat membantu jika butuh terowongan tidak usah jauh tapi sayangnya usaha penyediaan pupuk macet” (NW, Selasa, 27/06/23).

Kesimpulan dari informan di atas bahwa BUMDes Barakkang bahwa BUMDes sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat setempat namun belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Faktor penghambat dan pendukung pendirian BUMDes Di Kecamatan Budong-Budong

1. Faktor penghambat pendirian BUMDes di Kecamatan Budong-Budong

Adapun faktor penghambat dalam pendirian BUMDes di Kecamatan Budong-Budong hanya dialami oleh 2 BUMDes yaitu BUMDes Babana dan BUMDes Salumanurung.

a. Faktor Penghambat Pendirian BUMDes Babana

“Kami memiliki beberapa kendala dalam membentuk Kembali BUMDes diantaranya yaitu kami kesulitan mencari orang yang serius ingin menjadi pengurus BUMDes, karena pengalaman sebelumnya usaha BUMDes semua berhenti karena kepengurusan yang tidak efektif. Kedua kami belum membentuk Kembali BUMDes karena kami belum bisa memberikan penyertaan modal sebab banyak hal-hal yang mendesak yang perlu kami anggar terutama sejak adanya wabah covid-19”. (AR, Senin, 12/06/23).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pendirian BUMDes Babana yaitu sulit menemukan orang yang serius menjadi pengurus BUMDes dan Pemerintah yang belum bisa memberikan penyertaan modal untuk BUMDes.

b. Faktor Penghambat Pendirian BUMDes Salumanurung

“Ada beberapa hambatan mengapa kami belum bisa mendirikan BUMDes kembali yaitu SK kepengurusan BUMDes sebelumnya sudah berakhir dan karena Kepala Desa baru belum paham bagaimana alur pembaharuan SK BUMDes. Kepala Desa ingin mendirikan Kembali BUMDes namun terhalang oleh kepengurusan sebelumnya belum menyetor laporan pertanggungjawaban”. (AR, Rabu, 14/06/23).

Dari pernyataan Informan AR di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat berdirinya BUMDes di Desa Salumanurung yaitu:

1. Adanya pergantian Kepala Desa dan Kepala Desa Salumanurung tidak paham tentang BUMDes
2. Pengurus BUMDes sebelumnya belum menyetor laporan pertanggungjawaban, sehingga Pemerintah Desa tidak bisa membuat SK pengurus BUMDes yang baru.
3. Sulitnya menemukan orang yang ingin menjadi pengurus BUMDes.

2. Faktor pendukung pendirian BUMDes di Kecamatan Budong-Budong

Adapun faktor pendukung dalam pendirian BUMDes di Kecamatan Budong-Budong yaitu Unit usaha yang dibangun BUMDes sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan JM yang menyatakan bahwa:

“Usaha yang dibangun sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat” (JM, Rabu, 21/06/23).

SA juga menyatakan hal yang serupa bahwa:

“Usaha yang dibangun oleh BUMDes sangat dibutuhkan masyarakat” (SA, Selasa, 27/06/23).

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Budong-Budong

a. Faktor penghambat BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Budong-Budong

Setiap usaha pasti menemui hambatan termasuk BUMDes di Kecamatan Budong-Budong yang mengalami beberapa hambatan seperti yang dinyatakan oleh SA sebagai Sekretaris Desa Barakkang yang menyatakan bahwa:

“Hambatan dalam pelaksanaan BUMDes yaitu Sumber daya manusia tidak menguasai tugas dan fungsinya, administrasi tidak lengkap, dan kurangnya kesadaran masyarakat seperti tidak membayar sesuai harga yang ditetapkan BUMDes bahkan ada yang

tidak membayar”. (SA, Selasa, 27/06/23).

Permasalahan yang sama juga dirasakan oleh BUMDes Tinali yang dinyatakan oleh JM bahwa:

“Masyarakat yang kurang kooperatif banyak yang meminjam dana di unit simpan pinjam BUMDes tapi tidak mengembalikan”. (JM, Rabu, 26/06/23).

Faktor penghambat yang lain juga dialami oleh BUMDes seperti pernyataan IS selaku Ketua BUMDes Salugatta menyatakan bahwa:

“Hambatan yang kami hadapi yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan karena kami pengurus baru jadi kami terbatas dalam menjalani usaha kami sendiri, dan kedua tingkat promosi harus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui usaha-usaha BUMDes” (IS, Selasa, 20/06/23).

Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui usaha-usaha BUMDes ini sesuai dengan pernyataan TG yang menyatakan tidak tahu menahu tentang BUMDes.

Adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh BUMDes adalah kurangnya edukasi dari pemerintah hal ini dinyatakan oleh RA selaku Ketua BUMDes Lumu menyatakan bahwa:

“Saya kecewa Pemerintah dan Pendamping Desa maupun pendamping kecamatan hanya menanyakan bagaimana keadaan BUMDes tapi tidak pernah memberikan solusi atas permasalahan yang kami hadapi”

Hal serupa juga dirasakan oleh SB (Ketua BUMDes Kire) yang menyatakan bahwa dia tidak tahu tugas dan fungsinya karena belum ada edukasi dari pemerintah.

Berdasarkan dari pernyataan seluruh informan diatas dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ialah:

1. Masyarakat yang kurang kooperatif seperti tidak membayar sesuai harga

yang ditetapkan oleh BUMDes bahkan ada yang tidak membayar.

2. Pemerintah dan Pengurus BUMDes jarang mensosialisasikan keberadaan BUMDes sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa desa memiliki badan usaha.
3. Pengurus BUMDes kurang paham atau belum menguasai tugas dan fungsinya contoh kasus BUMDes di Desa Lumu, Barakkang, Kire.
4. Pemerintah hanya melakukan kunjungan ke BUMDes tetapi tidak memberikan saran dan masukan akan permasalahan aatau kendala yang dihadapi BUMDes. Contoh kasus di Desa Lumu.
5. Terjadi kerusakan sarana prasarana BUMDes sehingga unit usahanya terhambat contoh kasusnya tenda terowongan di Desa Kire yang sudah setengah tahun masih dalam perbaikan.

4. Faktor pendukung BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Budong-Budong

1. Pemerintah dan BUMDes aktif mengadakan event olahraga sehingga ekonomi masyarakat meningkat contohnya BUMDes yang ada di Desa Salugatta. IS menyatakan bahwa:

“Kami dan pemerintah aktif mengadakan event olahraga sehingga perekonomian masyarakat dapat berputar ke arah positif” (IS, 20/06/23).

2. Usaha yang dibangun oleh BUMDes sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat (semua Desa kecuali Babana dan Salumanurung karena SK kepengurusan tidak diperbaharui dan pengurus lama sudah tidak aktif lagi).
3. Penghasilan BUMDes sudah menambah Pendapatan asli desa.

Contoh BUMDes Salugatta,
Tinali, Pontanakayyang.

Pembahasan Hasil Penelitian

Lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 87 ayat 1 bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang membuat seluruh desa di Kecamatan Budong-Budong mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan meningkatkan penghasilan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Meski demikian terjadi beberapa kendala yang dihadapi badan usaha milik desa di Kecamatan Budong-Budong sehingga beberapa Badan Usaha Milik Desa berhenti seperti Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Salumanurung dan Desa Babana.

Berdasarkan klasifikasi usaha badan usaha milik desa, Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten MamujuTengah sudah memenuhi standar dengan bergerak dalam usaha *Banking* dan usaha *Renting* atau bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti penyewaan kursi dan tenda terowongan, selain itu Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Budong-Budong juga mempunyai usaha *Trading* seperti menjual sarana produksi pertanian.

Pada penelitian terdahulu tentang Badan Usaha Milik Desa oleh Annisa Khurniatul Jannah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang dibuktikan dari unit usaha yang dimiliki oleh badan usaha milik desa dapat memfasilitasi kebutuhan usaha masyarakat desa seperti permodalan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, selain berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat juga berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang akan berpengaruh terhadap perekonomian desa. Melihat dari

kesamaan usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah dengan Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa lebih banyak bergerak dalam bidang usaha *Banking* dan usaha *Renting*.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan BUMDes yang ada di Kecamatan Budong-Budong diantaranya di Desa Babana, Desa Kire, Desa Lumu, Desa Salumanurung, Desa Barakkang, Desa Tinali, Desa Salugatta, Desa Pontanakayyang pada dasarnya sangatlah penting dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa sebagaimana fungsi dan tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan pembangunan ekonomi desa. Namun dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Budong-Budong berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis, ditemukan adanya kesenjangan sumber daya manusia dalam hal pengelolaanya. Di tiap-tiap Desa tempat penelitian masih terdapat banyak pengurus BUMDes yang tidak paham dan taat pada standar oprasional dan prosedural yang telah ditetapkan, bahkan di kalangan Pemerintah Desa sendiri sebagai pengawas dan pengontrol BUMDes masih ada yang belum memahami pengelolaan BUMDes yang baik. Faktor penghambat lainnya ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait fungsi dan tujuan BUMDes sehingga masyarakat yang telah mendapatkan bantuan modal dari BUMDes tidak bertanggung jawab seperti modal yang telah dipinjamkan tidak dikembalikan. Hal inilah yang menyebabkan BUMDes yang telah dibentuk di Kecamatan

Budong-Budong ada yang berhenti beroperasi bahkan pengurusnya mengundurkan diri.

Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka penulis memberikan rekomendasi saran sebagaimana berikut:

1. Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Budong-Budong yang belum efektif lantaran kurangnya pemahaman dan kesadaran Pemerintah Desa, Pengurus dan Masyarakat terkait keberadaan BUMDes maka sangat penting untuk memperbanyak edukasi terkait asas kemanfaatan dan pengelolaan BUMDes yang baik, sehingga BUMDes yang dibentuk dapat memajukan perekonomian masyarakat.
2. Keberadaan BUMDes di Kecamatan Budong-Budong harus terus diupayakan beroprasi sebagaimana mestinya agar lapangan pekerjaan tercipta bagi masyarakat, mengurangi urbanisasi dan melatih kemandirian ekonomi masyarakat khususnya desa.
3. Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Budong-Budong harus lebih inovatif serta membangun mitra-mitra untuk memperluas relasi usaha dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses keperluan usahanya.
4. Karena kurangnya modal dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Budong-Budong maka Pemerintah Desa dapat menambah pemberian modal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan unit-unit usaha dari BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Febryani, H., Nurmalia, R, Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95-103

Junaidi, A. (2022). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDes Murni Jaya Desa Rambaian Kecamatan Gaung Anak Serka)* (Doctoral Dissertation, STAI Auliaurasyidin Tembilahan).

Putra, Y. (2020) *Peran Badan Usaha Milik Desa Tandung Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

Dahwadin & Nurhasan.J. A., (2018) Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu, *Jurnal, STAI Al-Musadiyah Garut*. Vol. 3, Nomor 2.

Agustina, E. (2019). The Role of Community Empowerment Carried Out By Village Government in the Regional Autonomy Era. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 34.

Hikmah, S. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat : Studi Kasus di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa* (Doctoral Dissertation, UIN Mataram).

Pariyanti, E., & Susiani, F. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Pebankan*, 2(2), 1-12.

JANNAH, A. K. (2022). Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES

Prasetya, E. (2020). *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*. CV. Hikam Media Utama. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 39-47.

- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk Bumdes. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pradnyani, N. L. P.S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Tibubeneng Kuta Utara.
- Dewi A. S. K., (2014) *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa*. Journal of Rulan And Developmen, Universitas Ganesha Singaraja, Vol. 9, Nomor 2.
- Anggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87-90
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132-142
- Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan muasyawarah desa pasal 88-89
- Peraturan Menteri desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
- Suleman, A.R., Revida, E., Soetijono, irwan Kurniawan, Sofyan & Hasibuan, A. F. H. (2020). BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Yayasan Kita Menulis.
- Wahed, M., Asmara, K., & Wijaya, R. S. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa). *Journal of Regional Economics...*, 1 (2), 58-70.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2009), 1
- Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 85.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 37.
- Andriani, P. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Bumdes Sejahtera Muara Uwai, Kec. Bangkinang, Kab Kampar) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Utami, A. D., 2022. *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung, Jawa Tengah. Literasi Desa Mandiri
- Suwendra, I. W., & Sujana, I. N. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 2(1), 398-402.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approuch). Deepublish. Yogyakarta.
- Anggito, A., & Setyawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak. Sukabumi.